

Tugas dan Tanggung Jawab Dinas Pendidikan Menuju Tertib Administrasi Pendidikan Yang Efisien dan Produktif

Hasperi Susanto

Dinas Pendidikan Kabupaten Lahat, Sumatera Selatan, Indonesia

Corresponding author e-mail: hasperifey@gmail.com

Abstrak

Dinas pendidikan telah hadir di Indonesia sejak kemerdekaan diproklamasikan. Dalam perkembangannya program kerja dinas selalu mengalami dinamika yang sangat cepat. Hal ini dalam rangka memenuhi kebutuhan civitas akademika pendidikan di lapangan. Penelitian ini bertujuan untuk menjabarkan tugas dan tanggung jawab Dinas Pendidikan dalam menjalankan programnya sehingga dapat bermanfaat bagi masyarakat. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi pustaka. Data utama dalam penelitian ini adalah berdasarkan dari artikel jurnal yang telah terbit dikuatkan dengan argumentasi tentang teori-teori dalam manajemen pendidikan. Temuan dalam penelitian ini adalah dinas pendidikan menerapkan program kerjanya dalam tugas dan pokok fungsi dinas pendidikan. Hal ini memiliki makna yang sama dengan program kerja.

Kata Kunci: Dinas Pendidikan, Peran Dinas Pendidikan, Tugas dan tanggung jawab

Abstract

The education office has been present in Indonesia since independence was proclaimed. In its development the work program of the service always experiences amazingly fast dynamics. This is in order to meet the needs of the educational academic community in the field. This study aims to describe the duties and responsibilities of the Department of Education in carrying out its program so that it can be useful for the community. The research method used in this research is literature study. The main data in this research is based on published journal articles which are corroborated by arguments about theories in education management. The findings in this study are the education office implements its work program in the duties and main functions of the education office. It has the same meaning as a work program.

Keywords: Education authorities, The role of the Education Office, Duties and responsibilities

A. Pendahuluan

Dinas Pendidikan adalah instansi pemerintahan kota/kabupaten yang bertanggung jawab terhadap Pendidikan siswa-siswi yang berada di kota atau kabupaten. Dinas Pendidikan kota mempunyai tugas dalam melaksanakan pendidikan sesuai dengan tanggung jawab yang sudah di berikan oleh Pemerintah. Salah satu tugas dan tanggung jawab dinas pendidikan adalah mengelola perkembangan pendidikan untuk anak-anak dengan mengetahui perkembangan anak-anak yang dilaporkan langsung oleh guru maka dapat mengetahui tumbuh kembang kemampuan siswa yang dimiliki. Dalam pengelolaan kegiatan sering sekali mengalami kesulitan dalam melaksanakan program kerja karena ketiaadaan program kerja. Keberadaan dinas pendidikan sebenarnya sudah eksis pada Undang-undang tentang Pemerintah Daerah. Tinggal program dari bupati/walikota/gubernur yang harus bijaksana dalam melaksanakan program kependidikan. Dengan demikian, artikel ini akan menguraikan tugas dan tanggung jawab Dinas Pendidikan agar terciptanya administrasi pendidikan yang tertib, efisien dan produktif.

B. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode studi pustaka. Metode ini memiliki makna bahwa kegiatan penelitian ini serangkaian kegiatan yang berkenaan dengan metode pengumpulan data pustaka, membaca dan mencatat serta mengolah bahan penelitian. Sedangkan menurut Mahmud, (2011) penelitian kepustakaan yaitu jenis penelitian yang dilakukan dengan membaca buku-buku atau majalah dan sumber data lainnya untuk menghimpun data dari berbagai literatur, baik perpustakaan maupun di tempat-tempat lain. Dari penjelasan tersebut dapat dipahami bahwa penelitian kepustakaan tidak hanya kegiatan membaca dan mencatat data-data yang telah dikumpulkan. Tetapi lebih dari itu, peneliti harus mampu mengolah data yang telah terkumpul dengan tahap-tahap penelitian kepustakaan. Dalam penelitian ini penulis menerapkan metode penelitian kepustakaan karena setidaknya ada beberapa alasan yang mendasarinya. Pertama bahwa sumber data tidak melulu bisa didapat dari lapangan. Adakalanya sumber data hanya bisa didapat dari perpustakaan atau dokumen-dokumen lain dalam bentuk tulisan, baik dari jurnal, buku maupun literatur yang lain. Kedua, studi kepustakaan diperlukan sebagai salah satu cara untuk memahami gejala-gejala baru yang terjadi yang belum dapat dipahami, kemudian dengan studi kepustakaan ini akan dapat dipahami gejala tersebut. Sehingga dalam mengatasi suatu gejala yang terjadi.

Tahapan metode ini adalah dengan mengumpulkan bahan-bahan penelitian berupa dokumen jurnal yang terkait dengan peranan dinas pendidikan di Indonesia terhadap kemajuan pendidikan di daerahnya. Kemudian ditunjang dengan teori-teori tentang manajemen yang relevan dengan data lapangan yang telah ditulis oleh artikel jurnal tersebut. Teori ini digunakan untuk memperkuat argumentasi mengenai data yang telah diambil dan diolah serta disajikan dalam penelitian ini.

C. Hasil dan Pembahasan

Tujuan manajemen pendidikan

Sebagaimana kita ketahui bahwa penyelenggaraan pendidikan memerlukan keterpaduan dan koordinasi seluruh sumber daya fisik dan manusia serta unsur-unsur pendidikan. Selain itu diperlukan efisiensi yang besar dengan itu berdasarkan simpati manusia, pemahaman, pengetahuan dan keterampilan. Sumber daya fisik terutama menyumbang peralatan bangunan dan bahan ajar.

Sumber daya manusia tersebut meliputi siswa, guru, pengawas, administrator dan orang tua. Elemen tambahan terdiri dari berbagai aspek teori dan praktik pendidikan termasuk filsafat pendidikan, tujuan pendidikan, kurikulum, metode pengajaran, disiplin, peran guru, aturan dan peraturan dll. Unsur-unsur tersebut adalah “bagian-bagian, dijadikan satu” dan merupakan komponen-komponen yang dibawa ke dalam hubungan yang harmonis. Jadi tujuan melakukan tugas vital tersebut adalah untuk memenuhi tujuan yang berbeda yang dikenal sebagai tujuan manajemen pendidikan.

Manajemen dalam pendidikan adalah cabang khusus dari manajemen sains, yang menggabungkan asal-usul pedagogi, psikologi, sosiologi, organisasi, manajemen dan pemasaran. Pendidikan Manajemen memiliki undang-undang khusus dan uniknya sendiri. Profesional manajemen pengetahuan bertanggung jawab atas kesadaran akan manajer terkait dengan pembentukan tiga instrumen manajemen yang berbeda: *Organisasi*, hierarki manajemen, yang utama berarti di sini adalah orang yang terkena dampak dari atas dengan cara motivasi, perencanaan, pengorganisasian, pengendalian, stimulasi dan sebagainya; *Budaya manajemen*, yaitu yang dikembangkan dan diakui oleh masyarakat, organisasi, kelompok nilai-nilai masyarakat, norma dan instalasi sosial, ciri-ciri perilaku; *Pasar*,

hubungan pasar, yaitu hubungan berdasarkan keseimbangan kepentingan penjual dan pembeli.

Menetapkan tujuan pendidikan secara umum dan pengelolaan proses pendidikan harus memastikan dukungan, rasa tantangan dan kegembiraan dari langkah-langkah pengembangan yang dibuat. Proses yang sedang berlangsung pembelajaran, yang bertujuan untuk mengembangkan keterampilan dan pengetahuan yang paling alat penting dari setiap manajer modern, karena satu kali peristiwa jarang menyebabkan perubahan perilaku yang diinginkan, sehingga pekerjaan ke arah ini harus sistematis. Kemampuan rekayasa manusia yang unik dan tidak dapat diakses dengan cepat mengorientasikan diri dalam situasi yang sulit hanya dapat diwujudkan ketika memiliki kualifikasi yang cukup dan informasi yang diperlukan (Chueva et al., 2016; Egorshin, 2005). Penciptaan seperti itu "layanan informasi" adalah tugas utama dari sistem kontrol. Inti dari manajemen masalah-fungsional adalah fokus, koordinasi dan pemecahan masalah tertentu. Integrasi upaya anggota tim tidak mungkin tanpa kendali terjemahan berdasarkan koordinasi.

Manajemen memiliki beberapa sifat berikut: 1) Manajemen pendidikan tidak mengacu pada proses tunggal melainkan proses atau aspek yang berbeda merupakan administrasi. Yaitu perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, koordinasi dan evaluasi. 2) Manajemen pendidikan adalah tugas nirlaba. Memiliki maksud bahwa tugas ini tidak memiliki orientasi bisnis dalam operasionalnya. Dalam pengerjaannya tidak meletakkan basis keuangan didalamnya. Namun begitu tetap mengusahakan agar tetap bisa efisien dalam setiap pengelolaan kegiatannya. 3) Manajemen pendidikan terutama merupakan usaha sosial karena lebih berkaitan dengan sumber daya manusia daripada dengan sumber daya material. 4) Manajemen pendidikan lebih merupakan seni daripada ilmu. Pasalnya, hubungan antarmanusia yang berlaku di sini tidak dapat dipertahankan dengan formula apapun. 5) Manajemen pendidikan mirip dengan manajemen umum dalam banyak hal, tetapi juga berbeda dengan manajemen umum dalam banyak hal. Hanya saja dalam implementasi dalam dunia pendidikan terdapat banyak sekali penyesuaian yang perlu dilakukan agar bisa diterima oleh staf maupun pimpinan dalam lingkungan civitas akademika pendidikan. 6) Manajemen pendidikan adalah urusan yang kompleks, tidak hanya sekedar urusan persoalan 1 masalah saja, terkadang juga masalah yang satu bisa menjadi kausal dari masalah yang lainnya. Oleh karena itu terkadang perlu penyelesaian secara komprehensif. Sumber (Agasisti et al., 2022; Chanthamith, 2019).

Tugas dan Tanggung Jawab Dinas Pendidikan

Salah satu tugas utama kepala dinas pendidikan adalah mengawasi dan melaksanakan serangkaian tujuan pendidikan di sejumlah program sekolah, kantor publik, dan fasilitas berbasis masyarakat lainnya. Ada berbagai posisi untuk petugas tersebut termasuk sistem sekolah. Banyak tujuan keseluruhan dari setiap program serupa, tetapi layanan individual didasarkan pada jenis fasilitas yang diawasi.

Seorang petugas pendidikan dalam sistem sekolah biasanya merancang kurikulum kursus dan teknik pengajaran berdasarkan penelitian pendidikannya. Musyawarah dan koordinasi yang sering dilakukan dengan tenaga kependidikan sekolah, kepala sekolah, dan guru biasanya diadakan oleh petugas pendidikan untuk menilai kemajuan dan memberi saran tentang perbaikan. Tujuan utamanya adalah untuk terus meningkatkan prosedur sekolah, program pelatihan untuk fakultas, dan bantuan individual siswa. Petugas meninjau evaluasi guru, tingkat kinerja siswa, dan fungsionalitas kurikulum untuk menentukan area masalah dan memperbaiki masalah untuk memastikan keberhasilan program di masa depan.

Dinas Pendidikan seringkali membutuhkan petugas dari dinas pendidikan untuk meningkatkan pengalaman belajar bagi civitas akademika dari sekolah dan siswa. Salah satu

tugas utama adalah mengembangkan kegiatan dan lokakarya yang memungkinkan pengunjung atau siswa untuk meningkatkan pemahaman mereka tentang berbagai pameran. Petugas sering mengembangkan proposal hibah dan mengatur sumber dana lain untuk kegiatan pendidikan tambahan. Dia dapat merancang strategi iklan berdasarkan berbagai layanan pendidikan yang ditawarkan museum untuk menarik sekolah dan organisasi lain .

Ada banyak pekerjaan lain yang mencari organisasi, presentasi informatif, dan bakat anggaran seorang petugas pendidikan. Tergantung pada posisinya, pekerjaan itu mungkin memerlukan gelar sarjana, tetapi beberapa institusi, termasuk dewan sekolah, memerlukan gelar master. Persyaratan ini umumnya tergantung pada jenis fasilitas, pedoman lokal, dan preferensi organisasi individu. Misalnya, petugas pendidikan publik yang bekerja dengan pemadam kebakaran setempat mungkin memerlukan sertifikasi dalam berbagai kursus keselamatan, dan posisi museum mungkin memerlukan gelar khusus dalam seni, sejarah, atau pendidikan.

Implementasi tugas dan tanggung jawab dinas pendidikan pada setiap daerah memiliki kewenangan yang berbeda-beda dan scope yang berbeda-beda pula. Hal ini dikarenakan perbedaan geografis dan demografinya yang menyebabkan kebutuhan tiap daerah tersebut berbeda. Dinas pendidikan bisa pula menjadi tempat terjadinya pembayaran janji politik kepala daerah yang terpilih melalui program-program yang telah dimilikinya dan dinas pendidikan tinggal mengimplementasikannya pada seluruh sekolah yang dinaunginya ataupun pendidikan non formal lainnya. Tugas dan tanggung jawab ini tertuang dalam Peraturan Daerah masing-masing Kabupaten/Kota yang disusun oleh Pemda dan DPRD daerah masing-masing (Sutapa & Purwanto, 2012).

Dinas Pendidikan adalah SKPD yang memiliki tanggung jawab dalam merencanakan, melaksanakan, mengawasi, mengevaluasi, dan membuat pertanggungjawaban tentang pelaksanaan tugas bidang pendidikan di lingkungan Pemerintahan Kabupaten. Sebagai sebuah organisasi, tercapainya visi dan misi Dinas Pendidikan Kabupaten ditentukan oleh kerjasama antara seluruh sistem organisasi, bidang, lini, staf, dan unit pelaksana teknis yang telah dibentuk berdasarkan tugas, pokok, dan fungsinya masing-masing. Karena itu dukungan seluruh sistem pada berbagai lini organisasi dan staf yang ada sangat menentukan bagi keberhasilan program kerja Dinas Pendidikan Kabupaten. Di samping itu, kemampuan manajerial pemimpin dalam menggerakkan orang lain untuk mencapai tujuan organisasi, juga memberikan kontribusi yang sangat menentukan bagi tercapainya tujuan organisasi Dinas Pendidikan Kabupaten. Dinas Pendidikan Kabupaten mengimplementasikan Perda tentang OPD dinas Pendidikan

Untuk melaksanakan tugas tersebut, Dinas Pendidikan mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut: 1) melakukan perumusan kebijakan dan rencana teknis sesuai dengan lingkup tugas kependidikan; 2) melaksanakan kebijakan dibidang Pendidikan; 3) melaksanakan evaluasi dan pelaporan dinas dibidang Pendidikan; 4) melaksanakan administrasi dibidang Pendidikan; 5) melaksanakan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya; 6) melakukan pembinaan dan melaksanakan tugas sesuai dengan lingkup pendidikan sebagai berikut: a) Menetapkan program kegiatan Dinas Pendidikan berdasarkan hasil evaluasi kegiatan tahun sebelumnya dan peraturan perundang-undangan yang berlaku; b) Menetapkan Rencana Strategis (RENSTRA), Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP), LPPD, Perjanjian Kinerja (PK), Rencana Kerja (Renja) serta analisis jabatan (Anjab) pada Dinas Pendidikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan; c) Menetapkan Standard Operasional Prosedur (SOP), Standard Pelayanan (SP), Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) Dinas Pendidikan; d) Menetapkan laporan keuangan periode bulanan, triwulan, semester dan tahunan secara berkala; e) Menetapkan kebijakan di bidang pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan nonformal, dan ketenagaan;

f) Melakukan pembinaan pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan nonformal, dan ketenagaan; g) Meningkatkan akses dan mutu layanan pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan nonformal, dan ketenagaan; h) Mendorong penguatan ekosistem pendidikan pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan nonformal, dan ketenagaan; menyusun rencana kerja dan program kerja Dinas Pendidikan; i) Melaksanakan pendidikan berbasis karakter dan pengintegrasian Imitaq dan Iptek di dalam pembelajaran pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan nonformal, dan ketenagaan; j) Meningkatkan tata kelola dan akuntabilitas penyelenggaraan pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan nonformal, dan ketenagaan; k) Mewujudkan sekolah berwawasan lingkungan, sekolah ramah anak pada jenjang pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, dan pendidikan nonformal; l) Meningkatkan peran serta masyarakat dan pelibatan publik di bidang pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan nonformal dan ketenagaan bagi berlangsungnya Program CERDAS; m) Menetapkan sistem data dan informasi pendidikan, aturan perilaku dan kode etik organisasi, sistem manajemen kinerja, pedoman penilaian risiko; n) pengendalian aset, indikator kinerja, dan sistem supervisi di lingkungan dinas Pendidikan; o) Membina pengelolaan laporan capaian kinerja, laporan akuntabilitas kinerja, laporan keuangan, laporan barang milik daerah yang menjadi tanggung jawab dinas Pendidikan; p) Menegakkan integritas dan nilai etika, aturan perilaku atau kode etik organisasi di lingkungan dinas Pendidikan; q) Mengkoordinasikan pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unit organisasi di lingkungan dinas Pendidikan; r) Melaksanakan monitoring, evaluasi, dan menilai prestasi kerja pelaksanaan tugas bawahan secara berkala melalui sistem penilaian yang tersedia; s) Membuat laporan pelaksanaan tugas kepada atasan sebagai dasar pengambilan kebijakan; t) Menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan secara lisan maupun tertulis berdasarkan kajian dan ketentuan yang berlaku sebagai bahan masukan guna kelancaran pelaksanaan tugas dan untuk menghindari penyimpangan dan; u) Melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan perintah atasan.

D. Kesimpulan

Dinas pendidikan di seluruh kabupaten dan propinsi di Indonesia memiliki peranan yang sangat vital bagi perkembangan dunia pendidikan di Indonesia. Selain menjadi kepanjangan tangan dari program Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Dinas Pendidikan juga merupakan implementator yang menerapkan program dengan penyelerasan sesuai dengan kearifan local pada tiap-tiap daerah. Dengan tidak mengesampingkan teori-teori dalam manajemen pendidikan, program-program yang digunakan pada kementerian pendidikan diimplementasikan dalam bentuk tugas dan pokok fungsi dinas pendidikan atau yang lebih dikenal dengan tupoksi. Tupoksi tersebut bertujuan agar program kerja dinas pendidikan bisa lebih fokus dan menyelesaikan masalah prioritas yang terjadi pada daerah tersebut. Selanjutnya bisa mengembangkan pendidikan sesuai dengan roadmap pendidikan yang telah digariskan oleh kementerian pendidikan.

Daftar Pustaka

- Agasisti, T., Froumin, I., & Platonova, D. (2022). Introduction to the Special Issue on Public Administration in Education. *In International Journal of Public Administration* (Vol. 45, Issue 2, pp. 81–83). Taylor & Francis.
- Ajasan, N. U. N. (2016). Efektivitas Pelaksanaan Supervisi Akademik oleh Kepala Sekolah dalam Meningkatkan Kinerja Guru Di Smk Negeri 1 Meulaboh. *Jurnal Administrasi Pendidikan : Program Pascasarjana Unsyiah*.

- Azhari, U. L., & Kurniady, D. A. (2016). Manajemen Pembiayaan Pendidikan, Fasilitas Pembelajaran, dan Mutu Sekolah. *Jurnal Administrasi Pendidikan*.
- Brandt, R. B. (1964). The concepts of obligation and duty. *Mind*, 73(291), 374–393.
- Burhanuddin, Y. (2005). *Analisis Administrasi Manajemen dan Kepemimpinan Pendidikan*. PT Bumi Aksara.
- Chanthamith, B. (2019). Issues and Challenges of the Development of Administration in Education Sector: Study on Education Sector in Lao PDR. *American Journal of Educational Science*, 5(1), 1–6.
- Chueva, T. I., Niyazova, G. M., Metsler, A. V, Shkurkin, D. V, Aznabaeva, G. H., & Kim, L. I. (2016). Approaches to the development of endowment funds in Russia as an instrument of mixed financing of the social sphere. *International Review of Management and Marketing*, 6(15).
- Darmadi, H. (2016). Tugas, peran, kompetensi, dan tanggung jawab menjadi guru profesional. *Edukasi: Jurnal Pendidikan*, 13(2), 161–174.
- Egorshin, A. (2005). *Human Resource Management: The Textbook for Higher Education Institutions (5th ed.)*. Nubus.
- Pidarta, M. (2016). Manajemen Pendidikan dalam Era Globalisasi. *Jurnal Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Malang*, 5(2), 111379.
- Rahayu, R., Guru, P., Dasar, S., & Abstrak, I. A. (2016). Peningkatan Karakter Tanggung Jawab Siswa SD Melalui Penilaian Produk pada Pembelajaran Mind Mapping. *Jurnal Konseling Gusjigang*, 2(1). <https://doi.org/10.24176/JKG.V2I1.562>
- Rebore, R. W. (2001). *Human resources administration in education: A management approach*. ERIC.
- Sari, D. N. A. (2018). *Implementasi Manajemen Berbasis Sekolah*. *Jurnal Administrasi Dan Manajemen Pendidikan*.
- Sutapa, M., & Purwanto, N. A. (2012). Pelaksanaan Tugas Pokok, Fungsi Pegawai Kantor Dinas Pendidikan Dalam Pelaksanaan Desentralisasi Pendidikan. *Jurnal Manajemen Pendidikan UNY*, 112285.